

E-WAL PERAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, Senin 22 April 2024

RINGKASAN BERITA HARI INI

DPRD Nilai Perlu Perketat Pelaporan Investasi karena Capaian 2023 Turun

KOTA-Realisasi investasi di Kabupaten Sidoarjo pada 2023 mencapai Rp 13,6 triliun. Angka itu melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 13,6 triliun. Hal itu merupakan pertambahan sebesar 164,97 persen.

Namun, jika dibandingkan dengan realisasi 2022 senilai Rp 14,1 triliun, terdapat penurunan sebesar Rp 404,8 miliar atau sekitar 2,87 persen.

Capaian tersebut terungkap dalam LKPD APBD 2023 yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi I DPRD Sidoarjo Sujudi mengemukakan, meskipun realisasi investasi melampaui target, namun penurunan dibandingkan tahun lalu perlu menjadi perhatian serius.

"Penurunan nilai investasi disebabkan karena kurang terlayannya perusahaan yang memiliki investasi dalam pelaporan investasi kepada OPD terkait," tegas Sujudi.

Oleh karena itu, Sujudi meminta Bupati Sidoarjo untuk memberikan perhatian khusus terhadap nilai dan perubahan investasi di daerahnya.

"Bupati perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan ketepatan perubahan dalam melakukan investasi," imbuhnya.

Selain itu, Sujudi juga mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo untuk lebih aktif dalam evaluasi terhadap

laksanaan yang dihadapi adalah bagaimana menarik investasi melalui capaian tersebut. Hal itu harus menjadi fokus utama bagi Pemkab Sidoarjo.

Di samping itu, perlu ada kepedulian kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, investor prioritas yang mengusung pola pertanian yang baik, melibatkan masyarakat serta memberikan manfaat yang terpenting, investasi harus benar-benar memberikan manfaat untuk pembangunan wilayah Sidoarjo.

Menurut dia, dengan banyaknya pelaku investasi masuk di Sidoarjo, diharapkan dapat menjadi akselerator mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, strategi kedua yang diimplementasikan adalah melalui program open class DPMPTSP Sidoarjo kepada kelas pelangan UMKM yang saat ini masih banyak yang belum memanfaatkan. Saat ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan program open class DPMPTSP Sidoarjo kepada kelas pelangan UMKM yang saat ini masih banyak yang belum memanfaatkan.

KPK Panggil Ulang Bupati Muhdlor Pekan Depan

Sidoarjo, Pejok Kiri - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor akan dipanggil kembali oleh Komisi I DPRD Sidoarjo untuk menghadiri rapat paripurna beberapa waktu mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Sidoarjo, Sujudi, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Sidoarjo, Senin (22/4/2024).

Sujudi mengatakan, Komisi I DPRD Sidoarjo telah memanggil Bupati Muhdlor untuk menghadiri rapat paripurna pada tanggal 15 April 2024. Namun, Bupati Muhdlor tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas di luar daerah.

"Kami telah memanggil Bapak Bupati Muhdlor untuk menghadiri rapat paripurna pada tanggal 15 April 2024. Namun, Bapak Bupati Muhdlor tidak dapat hadir karena sedang melaksanakan tugas di luar daerah," ujar Sujudi.

Untuk itu, Komisi I DPRD Sidoarjo telah memutuskan untuk memanggil kembali Bupati Muhdlor pada tanggal 29 April 2024.

PDI Perjuangan Buka Penjurangan Bacabup-Bacawabup

Sidoarjo, Memomarkan - Pilkada serentak bakal digelar akhir tahun ini. Nama-nama calon bupati (cabup) dan wakil bupati (cabub) pun mulai bermunculan. Partai politik mulai membaratkan untuk mempersiapkan diri.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Sidoarjo telah membuka penjurangan bacabup-bacawabup pada tanggal 21 April 2024.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap calon-calon yang akan maju dalam Pilkada serentak tahun 2024.

"Kami membuka penjurangan bacabup-bacawabup sebagai bentuk dukungan terhadap calon-calon yang akan maju dalam Pilkada serentak tahun 2024," ujar Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo, Sumi Harsono.

JANGAN LEWATKAN KESEMPATAN SAMBUT GENERASI EMAS MARGA SIDOARJO

Sidoarjo, Pejok Kiri - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan menggelar acara sambutan generasi emas di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 15 Mei 2024.

Acara ini akan dihadiri oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Wakil Bupati Sidoarjo Dwi Eko Saptomo. Selain itu, akan ada perwakilan dari instansi terkait dan masyarakat umum.

Acara ini bertujuan untuk memperingati generasi emas Indonesia yang akan datang dan sekaligus sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor kontak yang tertera di bawah ini.

16 APRIL 15 MEI 2024

16 APRIL 15 MEI 2024

16 APRIL 15 MEI 2024

Sidoarjo Buka Pendaftaran Bupati dan Wabup

Sidoarjo - HARIAN BANGSA Pilkada serentak bakal digelar akhir tahun ini. Dunia politik di tanah air pascapilpres dan pileg kini kembali memanas. Tak terkecuali di Kabupaten Sidoarjo. Nama calon bupati dan wakil bupati mulai bermunculan.

Partai politik mulai membaratkan untuk mempersiapkan diri. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Sidoarjo telah membuka penjurangan bacabup-bacawabup pada tanggal 21 April 2024.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap calon-calon yang akan maju dalam Pilkada serentak tahun 2024.

"Kami membuka penjurangan bacabup-bacawabup sebagai bentuk dukungan terhadap calon-calon yang akan maju dalam Pilkada serentak tahun 2024," ujar Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo, Sumi Harsono.

Lubang Hambat Arus Lintas di Gedangan

Pemkab Tak Perbaiki, Tungguing BBPIN

SIDOARJO - Lubang hambat arus lintas di Jalan Ahmad Yani, tepat di perempatan Gedangan sisi selatan, melambatkan kemacetan (21/4). Menjelang lubang kecil di aspal jalan. Namun, karena volume kendaraan yang padat, keberadaan lubang kecil ini dirasa cukup mengganggu.

"Agung Sasana, salah seorang warga, menilai, lubang jalan tersebut membuat lalu lintas terhambat. Terutama saat volume kendaraan padat. Dia menyatakan, perempatan Gedangan macet pada Sabtu malam lalu. "Macet dari Sidoarjo ke Surabaya, dari depan Perumahan Pari sampai perempatan Gedangan," katanya. Selain karena macet yang melintas saat malam Minggu, pengendara juga harus menghindari lubang yang melintang di aspal. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air DPBMSDA

Tuntas 100 Persen, Flyover Diuanda Dibuka Seterusnya

Peresmian Tunggu Jadwal Kementerian

SIDOARJO - Rencananya, untuk mengantisipasi kemacetan selama libur Lebaran, flyover Djuanda dibuka sementara. Mulai 2 April sampai 10 April. Namun, kini flyover diputuskan untuk dibuka seterusnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptomo mengatakan, rencana awal memang ada penutupan flyover Djuanda. Sebab, masih butuh persiapan beberapa bulan, lampu penenangan jalan, hingga lanskap atau taman di area bawah flyover, seluruhnya sudah tuntas. "Jadi, flyover Djuanda masih tetap fungsional. Tidak ada penutupan kembali," ujarnya.

Dia mengatakan, uji coba sudah dilakukan beberapa kali dan tidak ada kendala. Bahkan, pengisian jalan saat ini mulai paham arah lintasan flyover. Tidak ada lagi warga yang bingung saat melintas. Hanya, seng penutup di area

Pendaftaran Beasiswa Dibuka hingga 15 Mei

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali membuka program beasiswa pendidikan tingkat dasar dan beasiswa keagamaan dengan sasaran 2.000 penerima. Pendaftaran dibuka mulai 16 April hingga 15 Mei 2024. Beasiswa itu merupakan salah satu program Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan

jangka menengah daerah (RPJMD) hingga tahun 2026. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, penyaluran beasiswa ini dengan total hingga tahun 2026 adalah sebesar 10 ribu penerima.

"Program ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keagamaan di Sidoarjo," kata Muhdlor.

Beasiswa tersebut terbagi menjadi empat kategori, yakni Prestasi Akademik, Prestasi Non Akademik, Beasiswa Kurang Mampu, dan Beasiswa Keagamaan. Sedangkan syarat pendaftarannya adalah, warga Kabupaten Sidoarjo, mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi aktif, tidak sedang menerima beasiswa

Jangan Tertipu Tawaran Visa Ummal untuk Haji

Imbauan Dirjen Penyelenggaraan Haji Hilman Latief

SIDOARJO, SURYA - Hanya visa haji yang bisa digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M. Jangan tertipu oleh tawaran berhadiah dengan visa ummal (pekerja), ziarah (turis), atau lainnya.

"Jangan percaya, karena hanya visa haji yang bisa digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M," kata Hilman melalui keterangan tertulis-

nya dari Jeddah, Minggu (21/4). Menurut Hilman, hal ini sangat penting diketahui masyarakat karena belakangan banyak info yang menawarkan haji tanpa antri dengan berbagai jenis visa. Info itu beredar di media sosial Facebook, Instagram, hingga pesan

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jangan Tertipu Tawaran Visa Ummal untuk Haji

► Imbauan Dirjen Penyelenggaraan Haji Hilman Latief

SIDOARJO, SURYA - Hanya visa haji yang bisa digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 Masehi. Jangan tertipu oleh tawaran berhaji dengan visa ummal (pekerja), ziarah (turis), atau lainnya.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengimbau masyarakat tidak mu-

dah tergiur dan tertipu tawaran berhaji menggunakan visa ummal (pekerja), ziarah (turis), atau lainnya. Bahkan ada yang menawarkan dengan sebutan visa petugas haji.

"Jangan percaya, karena hanya visa haji yang bisa digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M," kata Hilman melalui keterangan tertulis-

nya dari Jeddah, Minggu (21/4).

Menurut Hilman, hal ini sangat penting diketahui masyarakat karena belakangan banyak info yang menawarkan haji tanpa antri dengan berbagai jenis visa. Info itu beredar di media sosial Facebook, Instagram, hingga pesan

KE HALAMAN 11

SURYA

Jangan...

■ DARI HALAMAN 1

berantai di berbagai grup WhatsApp.

"Setelah berdialog dengan Kementerian Haji dan Umrah serta berbagai pihak, kami menegaskan lagi, bahwa untuk keberangkatan haji harus menggunakan visa haji," pesannya.

Hilman sendiri saat ini sedang berada di Arab Saudi untuk memantau persiapan akhir penyediaan layanan bagi jemaah Indonesia pada operasional haji 1445 H/2024 M.

"Saudi sudah menyampaikan kepada kami terkait potensi penyalahgunaan penggunaan visa non-haji pada haji 2024, itu betul-betul akan dilaksanakan secara ketat dan akan ada pemeriksaan yang intensif dari otoritas Saudi," sambungnya.

Visa haji diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Pasal 18 UU PIHU mengatur bahwa visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia, dan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Visa kuota haji Indonesia terbagi dua. Yakni, haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Tahun ini, kuota haji Indonesia sebanyak 221.000 jemaah. Indonesia juga mendapat 20.000 tambahan kuota. Total kuota haji Indonesia pada operasional tahun ini 241.000 jemaah.

Untuk warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, UU PIHU mengatur bahwa keberangkatannya wajib melalui PIHK. PIHK yang memberangkatkan warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri Agama.

Hilman mengakui antrian saat ini memang panjang seiring tingginya antusiasme masyarakat Indonesia untuk beribadah haji. Namun, masyarakat juga harus lebih cermat terhadap setiap informasi yang menawarkan berangkat haji tanpa antrian.

"Sudah banyak yang tertipu dengan iming-iming bisa berangkat haji tanpa antri atau haji langsung berangkat. Penawaran semacam ini makin masif diiklankan di media sosial," ucap Hilman.

Apalagi, lanjutnya, Arab Saudi juga sudah menegaskan akan menerapkan kebijakan-kebijakan baru yang lebih komprehensif

pada haji 2024, baik dari segi kesehatan, visa, dokumen, dan lainnya.

"Akan ada banyak pemeriksaan di berbagai tempat. Diimbau kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan tawaran keberangkatan haji tanpa antri yang menawarkan visa selain visa haji," pesannya.

Kementerian Haji dan Umrah Saudi mengajak Kemenag bekerja sama lebih erat. Ia menyebutkan, detail dan komprehensif untuk menjaga jangan sampai ada korban jemaah yang dirugikan.

"Ini sekali lagi saya mengingatkan agar tidak banyak anggota masyarakat yang tertipu atau terkena masalah," tandasnya.

Terpisah, Direktur Layanan Haji dalam Negeri pada Ditjen PHU Kemenag Saiful Mujab menambahkan pihaknya saat ini tengah menyiapkan dokumen dan memproses visa jemaah haji reguler Indonesia. Menurutnya, setelah proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) selesai, tahap selanjutnya adalah persiapan dokumen dan proses pemvisaan.

"Saat ini sedang proses visa dan dokumen lainnya seperti paspor, bio visa, dan lainnya," sebut Saiful.

Sampai sekarang, sudah sekitar 23.000 jemaah yang sudah terbit visanya. Ini

akan terus berproses hingga semua visa jemaah haji Indonesia terbit.

Bersamaan dengan proses pemvisaan, kata Saiful Mujab, pihaknya juga melakukan proses pemaketan layanan jemaah dan penyusunan kelompok terbang (kloter). Untuk jadwal penerbangan jemaah haji sudah ditetapkan, baik yang akan berangkat dengan Saudia Airlines maupun Garuda Indonesia.

"Kami juga sedang melakukan persiapan akhir asrama haji, baik sebagai embarkasi, transit, maupun embarkasi antara, untuk menerima jemaah," sebutnya.

Kloter awal jemaah haji gelombang pertama dijadwalkan masuk asrama haji pada 11 Mei 2024. Mereka akan terbang sehari berikutnya, dari embarkasi menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah.

Proses pemberangkatan jemaah gelombang pertama ke Madinah akan berlangsung dari 12-23 Mei 2024.

Sementara untuk jemaah haji gelombang kedua, kloter awal akan mulai masuk asrama haji pada 23 Mei 2024. Mereka akan diberangkatkan dari Embarkasi menuju King Abdul Aziz International Airport (KAIA) Jeddah mulai 24 Mei sampai 10 Juni 2024. (ufi)

SURYA

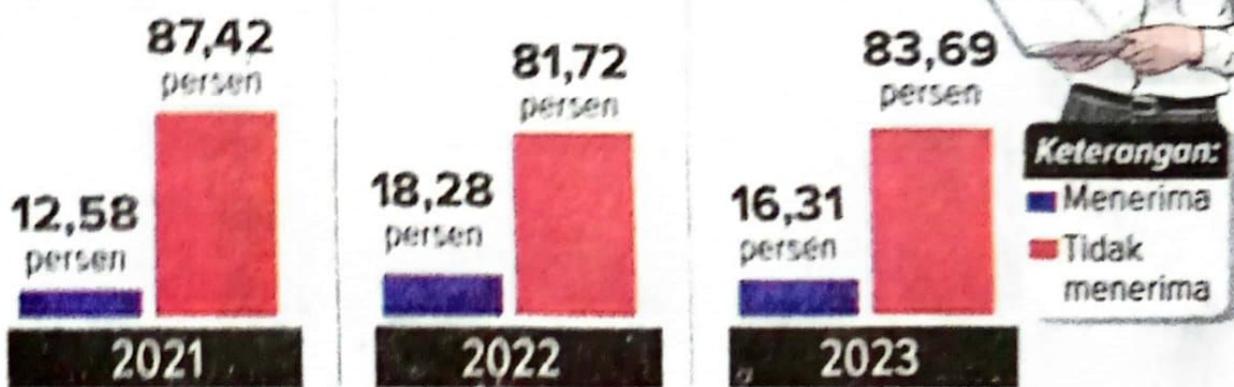


INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIDOARJO DALAM ANGKA

Rumah Tangga yang Memiliki Jaminan Sosial Hari Tua



Sumber: BPS Sidoarjo

GRAFIS: RIZKY/JAWA POS

JUMLAH kepemilikan jaminan hari tua di Kabupaten Sidoarjo masih sangat rendah, yaitu di bawah 20 persen. Artinya, dari total 2,125 juta penduduk, kurang dari seperlimanya yang memiliki jaminan hari tua. (uzi/c7/any)

Jawa Pos



KPK PANGGIL ULANG BUPATI MUHDLOR PEKAN DEPAN

Sidoarjo, Pojok Kiri

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor tak memenuhi panggilan KPK hari ini karena sakit. KPK akan memanggil kembali Gus Muhdlor pekan depan.

"Minggu depan, kami akan panggil kembali tersangka ini untuk hadir," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2024).

Namun Ali belum bisa menyampaikan kapan hari dan waktu persisnya Gus Muhdlor dipanggil kembali. Dirinya akan segera menyampaikan.

"Nanti mengenai waktunya akan kami sampaikan lagi ke teman-teman setelah kami mendapatkan informasi yang pasti tanggal berapa

panggilan tersebut untuk hadir," katanya.

Untuk panggilan hari ini, Ali memastikan Gus Muhdlor telah mendapatkan surat panggilan. Dan untuk panggilan kedua, Ali mengimbau Gus Muhdlor untuk kooperatif.

Jadi nanti kami panggil yang kedua kalinya tentunya. Oleh karena itu, kami tentu kami berharap yang bersangkutan juga kooperatif ya," ucapnya.

Sebelumnya, KPK memanggil Gus Muhdlor, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemotongan insentif ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo, hari ini. Namun Gus Muhdlor tak memenuhi panggilan tersebut.

"Hari ini memang Bupati Sidoarjo tidak dapat hadir memenuhi panggilan pemer-

iksaan oleh KPK tersebut karena sakit," ujar pengacara Gus Muhdlor, Musthofa Abidin, saat dimintai konfirmasi, Jumat (19/4).

Musthofa mengatakan menghormati panggilan oleh KPK terhadap kliennya. Dia menyebutkan permohonan penundaan pemeriksaan telah disampaikan kepada KPK.

"Dan tadi pagi kami sudah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada KPK," tuturnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka. Gus Muhdlor menjadi tersangka terkait dugaan pemotongan insentif ASN di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo. (Nang)

Lubang Hambat Arus Lintas di Gedangan

Pemkab Tak Perbaiki,
Tunggu BBPJN

SIDOARJO - Lalu lintas (lantas) di Jalan Ahmad Yani, tepat di perempatan Gedangan sisi selatan, melambat kemarin (21/4). Muncul lubang kecil di aspal jalan. Namun, karena volume kendaraan yang padat, keberadaan lubang tersebut dirasa cukup mengganggu.

Agung Sasono, salah seorang warga, menilai, lubang jalan tersebut membuat lalu lintas terhambat. Terutama saat volume kendaraan padat. Dia menyatakan, perempatan Gedangan macet pada Sabtu malam lalu. "Macet dari Sidoarjo ke Surabaya, dari depan Perumahan Puri sampai perempatan Gedangan," katanya. Selain karena ramai yang melintas saat malam Minggu, pengendara juga harus menghindari lubang.

Untung, kemarin sudah tidak tampak kemacetan. Sebab, volume kendaraan tidak sepadat malam Minggu. Dia



BIKIN MACET: Aspal yang ambles di perempatan Gedangan membuat pengendara melambat sehingga arus lalu lintas terhambat.

berharap, karena perempatan Gedangan rawan macet, baiknya lubang jalan segera ditangani.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air DPUBMSDA

Sidoarjo Dwi Eko Saptono menyatakan, jalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. "Karena jalan itu masuk jalan nasional," katanya. Dengan begitu, pihaknya akan menyampaikan

terlebih dulu ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali agar segera ada penanganan.

"Nanti kami laporkan ke BBPJN," katanya. Pihaknya masih akan menunggu

BBPJN Jatim-Bali. Dengan demikian, sementara ini Pemkab Sidoarjo belum menangani lewat satgas penanganan jalan maupun pemeliharaan kontraktual. (uzi/c12/any)

Jawa Pos

Tuntas 100 Persen, Flyover Djuanda Dibuka Seterusnya

Peresmian Tunggu
Jadwal Kementerian

SIDOARJO - Rencananya, untuk mengantisipasi kemacetan selama libur Lebaran, flyover Djuanda dibuka sementara. Mulai 2 April sampai 19 April. Namun, kini flyover diputuskan untuk dibuka seterusnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan, rencana awal memang ada penutupan kembali flyover Djuanda. Sebab, masih



SUDAH SELESAI: Aktivitas lalu-lalang kendaraan di FO Djuanda kemarin. Rencana ditutup setelah Lebaran batal karena proyek sudah tuntas 100 persen.

butuh merapikan beberapa bagian yang belum, terutama area lanskap. "Awalnya memang 19 April ditutup lagi. Namun, ini sudah tuntas semuanya. Sudah seratus persen," katanya.

Baik konstruksi flyover,

kelengkapan jalan seperti rambu, lampu penerangan jalan, hingga lanskap atau taman di area bawah flyover, seluruhnya sudah tuntas. "Jadi, flyover Djuanda masih tetap fungsional. Tidak ada penutupan kembali," ujarnya.

Dia mengatakan, uji coba sudah dilakukan beberapa kali dan tidak ada kendala. Bahkan, pengguna jalan saat ini mulai paham alur melintas di flyover. Tidak ada lagi warga yang bingung saat melintas. Hanya, seng penutup di area

taman masih terpasang. Area taman masih ditutup. Pohon-pohon tinggi sudah terpasang, tinggal menunggu tumbuh daun baru.

"Penerangan jalan dan rambu juga sudah lengkap dan telah dicek," ujar Dwi. Mural untuk menghias pancang flyover dan girder pun telah selesai. "Sudah kelihatan khas Sidoarjo, ada tema udang dan bandengnya," tuturnya. Rencananya, di minggu ke-4 ini flyover tersebut diresmikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Jadwal peresmian masih menunggu dari kementerian," tandasnya. (uzi/c7/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo Buka Pendaftaran Bupati dan Wabup

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
Pilkada serentak bakal digelar akhir tahun ini. Dunia politik di tahan air pascapilpres dan pileg kini kembali memanas. Tak terkecuali di Kabupaten Sidoarjo. Nama calon bupati dan wakil bupati mulai bermunculan. Parpol pun mulai menjaring calon-calon bupati dan wakil bupati. Tak terkecuali DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo.

SABTU 20 April 2024 malam, bertempat di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo di Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, digelar rapat untuk membahas pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo yang bakal diusung PDI Perjuangan.



Rapat membahas calon bupati dan wakil bupati di kantor DPC PDI Perjuangan Sidoarjo.

Rapat dipimpin Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo, Sumi Harsono. "Ini saya lagi rapat membahas calon bupati dan wakil bupati," ujar Sumi Harsono,

Sabtu (20/4)
Hari pertama pembukaan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati ini sangat istimewa dan spesial. Mengapa, karena Minggu

21 April 2024 bertepatan dengan Hari Kartini. "Ini hari yang istimewa. Kita buka pendaftaran bertepatan dengan Hari Kartini," paparnya. Sampai kapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati ini dibuka DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo, Sumi Harsono menguraikan, sampai kapan pendaftaran, ini masih dirapatkan di DPC PDI Perjuangan. Yang jelas, akhir Mei 2024, pihaknya harus melaporkan calon bupati dan wakil bupati ke DPD PDI Perjuangan. Jadi yang berminat maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo dari PDI Perjuangan, monggo datang ke kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo mulai Minggu 21 April 2024," tandasnya. (md/rus)

HARIAN
BANGSA
Koran Warga Jati

Pendaftaran Beasiswa Dibuka hingga 15 Mei

KOTA - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kembali membuka program beasiswa pendidikan tinggi dan beasiswa keagamaan dengan sasaran 2.000 penerima. Pendaftaran dibuka mulai 16 April hingga 15 Mei 2024. Beasiswa itu merupakan salah satu program Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga tahun 2026. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan target penyaluran beasiswa ini dengan total hingga tahun 2026 adalah sebesar 10 ribu penerima. "Program ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keagamaan di Sidoarjo,"

kata Muhdlor. Beasiswa tersebut terbagi menjadi empat kategori. Yakni Prestasi Akademik, Prestasi Non Akademik, Beasiswa Kurang Mampu, dan Beasiswa Keagamaan. Sedangkan syarat pendaftarannya adalah, warga Kabupaten Sidoarjo, mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi aktif, dan tidak sedang menerima beasiswa

serupa atau sejenis dari pihak manapun. Masyarakat Sidoarjo yang hendak mendaftar nantinya akan diminta untuk mengisi formulir dan mengunggahnya di website pendaftaran beasiswa. Peminat beasiswa ini memang selalu membeludak. Tahun lalu, jumlah pendaftar mencapai 5 ribu orang. Namun memang hanya 2 ribu

kuota yang disediakan. Pada 2023, sebanyak 65 persen mahasiswa dianugerahi beasiswa melalui prestasi akademis. Sementara 35 persen melalui prestasi olahraga. Dengan memberikan beasiswa, Pemkab Sidoarjo berharap dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi lebih baik lagi. (nis/vga)

RADAR
SIDOARJO.ID



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

BEASISWA PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024

BEASISWA PENDIDIKAN

Beasiswa Bidang 1

- Helpdesk 081234278662 (Bagian Kesra)

Beasiswa Prestasi Akademik

- Helpdesk 089630324926 081235949497 (Disporapar)

Beasiswa Kurang Mampu

- Helpdesk 085711404090 (Dinas Sosial)

Beasiswa Prestasi Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kebudayaan, Olahraga, Sosial, Kemanusiaan, Lingkungan, Nasionalema

- Helpdesk 089630324926 081235949497 (Disporapar)

16 APRIL - 15 MEI 2024

PENDAFTARAN

PERGYARATAN

Persyaratan Umum

- Warga Kabupaten Sidoarjo
- Mahasiswa/Mahasiswi Perguruan Tinggi ASIF (KIKATP Kab Sidoarjo)
- Mengisi form dan mengunggah file dokumen pada aplikasi https://beasiswa.sidoarjo.kab.go.id
- Tidak sedang menerima beasiswa serupa/seperti dari pihak manapun

<https://beasiswa.sidoarjo.kab.go.id>

JANGAN LEWATKAN KESEMPATAN SAMBUT GENERASI EMAS WARGA SIDOARJO

Sidoarjo, Pojok Kiri

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo senang berbagi kabar baik! Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan memberikan BEASISWA pendidikan tinggi untuk MAHASISWA SIDOARJO yang berprestasi dalam keagamaan, non akademik, prestasi akademik dan kurang mampu dengan

target 2.000 penerima. Berikut pengumuman dan link pendaftarannya.

"Ayo jangan lewatkan kesempatan emas ini, mari kita berlomba lomba menyambut Indonesia Emas melalui generasi emas Sidoarjo." tutur Pemrehati Pendidikan, Willy pada wartawan, Minggu, 21/4/24. (Khol/Ben)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Raskal dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
Papat membahas silor buptid dan wakil busati di Kantor DPC PDI Perjuangan Sidoarjo.

PDI Perjuangan Buka Penjaringan Bacabup-Bacawabup

Sidoarjo, Memorandum

Pilkada serentak bakal digelar akhir tahun ini. Nama-nama calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) pun mulai bermunculan. Parpol pun mulai menebar jaring untuk mendapatkan sosok yang akan diusung nanti Tak terkecuali DPC PDI Perjuangan Sidoarjo.

Kantor DPC PDI Perjuangan Sidoarjo di Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Sabtu (20/4) malam, terlihat ramai dengan aktivitas. Di dalam kantor, ternyata berlangsung rapat untuk membahas pendaftaran cabup-cawabup. Dipimpin Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo, Sumi Harsono, rapat berlangsung dinamis. "Ini saya lagi rapat membahas calon bupati dan wakil bupati," ujar Sumi Harsono kepada *Memorandum* ketika dihubungi.

Politisi jebolan salah satu pesantren di Jombang itu menambahkan, sehari setelah rapat, PDI Perjuangan resmi membuka pendaftaran. "Monggo yang mau mendaftar. Silakan datang ke kantor DPC PDI Perjuangan Sidoarjo," jelasnya.

Bukan tanpa makna pembukaan pendaftaran dipilih pada 21 April 2024. Sebab, kemarin berte-

patan dengan Hari Kartini. Sosok Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai tokoh pahlawan pendobrak di masanya dengan pemikiran visioner yang termuat dalam bukunya, habis gelap tertiblah terang. "Ini sebagai cambuk kita bersama semoga semangat para pahlawan kita terus kita warisi, api perjuangannya termasuk bapak *founding father* kita Ir Soekarno," tandasnya.

Rencananya, pendaftaran dibuka sampai akhir Mei 2024 sebelum dilaporkan hasilnya ke DPP. Dengan *tagline* Sidoarjo memanggil pemimpin, rilis itu disebar kemarin. Bung Sumi, panggilan akrabnya memaparkan, langkah gerak terdapan untuk memulai pesta demokrasi pemilihan daerah serentak pada 27 November mendatang, membuka peluang bagi calon eksternal untuk mendaftar.

"Kita membuka pendaftaran dengan harapan bagi putra putri terbaik di Sidoarjo yang punya integritas dan komitmen memajukan Sidoarjo mendatang, baik itu dari pengusaha, birokrat tokoh masyarakat, tokoh agama dan generasi muda memberikan ruang untuk pengabdian mereka," ujarnya. (jok/epe)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Nilai Perlu Perketat Pelaporan Investasi karena Capaian 2023 Turun

KOTA-Realisasi investasi di Kabupaten Sidoarjo pada 2023 mencapai Rp 13,6 triliun. Angka itu melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 7,3 triliun. Hal itu menunjukkan pertumbuhan sebesar 184,97 persen.

Namun, jika dibandingkan dengan realisasi 2022 senilai Rp 14 triliun, terdapat penurunan sebesar Rp 404,8 miliar atau sekitar 2,87 persen.

Capaian tersebut terungkap dalam LKPJ APBD 2023 yang disampaikan oleh Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Sudjalil mengatakan, meskipun realisasi investasi melampaui target, namun penurunan dibandingkan tahun lalu perlu menjadi perhatian serius.

"Penurunan nilai investasi disebabkan karena kurang terlibatnya perusahaan yang memiliki investasi dalam pelaporan nilai investasinya kepada OPD terkait," tegas Sudjalil.

Oleh karena itu, Sudjalil meminta Bupati Sidoarjo untuk memberikan perhatian khusus terhadap nilai dan pertumbuhan investasi di daerahnya.

"Bupati perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melaporkan nilai investasinya," imbuhnya.

Selain itu, Sudjalil juga mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP) Sidoarjo untuk lebih aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap



BAMBANG PUJIYANTO
Ketua Komisi B



SUDJALIL
Anggota Komisi B



SULLAMUL HADI NURMAWAN
Anggota Komisi B

realisasi investasi di Sidoarjo. "DPMP-TSP harus gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan tentang pentingnya pelaporan nilai investasi," tandasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan realisasi investasi di Sidoarjo dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Delta.

Anggota Komisi B Sullamul Hadi Nurmawan menilai nilai investasi memang seharusnya meningkat. Sebab sudah didukung oleh masifnya betonisasi. Bahkan di ruas jalan antardesa antarkacamatan pada 2023 yang dinilai mampu mengerek laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.

Pembangunan infrastruktur khususnya jalan beton di Sidoarjo semakin digenot. Di kawasan Sidoarjo selatan seperti, Jabon, Porong, Krebung, Prambon, Tulangan dan kawasan Sidoarjo barat seperti Balongbendo,

Krian, Taman, Wonoayu, Sukodono dan Tarik proyek betonisasi terus dikebut.

Pembangunan dilakukan sampai ke wilayah yang jauh dari pusat kota. Jalan-jalan kabupaten yang menghubungkan antardesa dibeton dan dilebarkan sebagai upaya pemerataan pembangunan guna membuka lebih luas lagi peluang investasi di kedua kawasan itu.

Menurut dia, proyek betonisasi memberi efek domino bagi ekonomi Sidoarjo. "Elek itu langsung dirasakan oleh masyarakat karena banyak bermunculan usaha-usaha menengah seiring dengan adanya peningkatan kualitas infrastruktur jalan," jelasnya.

Peluang investasi di Kota Udad pun terbuka lebar. Terutama peluang investasi di wilayah Sidoarjo barat karena Pemkab Sidoarjo dengan progresif membangun dan menyiapkan infrastruktur untuk kelancaran usaha.

"Peluang usaha sangat terbuka lebar seiring dengan bertambah baiknya kualitas infrastruktur jalan yang menghubungkan antardesa dan kecamatan," imbuhnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya mengembangkan investasi dengan tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan kesejahteraan rakyat.

Langkah-langkah konkret yang diambil dalam pembahasan tersebut melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Hal ini untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan," imbuhnya.

Dengan demikian, Pemkab harus terus berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketua Komisi B Sidoarjo Bambang Pujiyanto menilai



POTENSI: Kawasan Industri di Jabon yang diprediksi bakal meningkatkan iklim investasi di Sidoarjo.

tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menarik investasi melebihi capaian tersebut. Hal itu harus menjadi fokus utama bagi Pemkab Sidoarjo.

Dia mengapresiasi berbagai upaya untuk meningkatkan daya tarik investasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-TSP).

Salah satunya melalui kolaborasi dengan berbagai komunitas, di mana mereka memberikan pendampingan pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). "Diharapkan para pelaku usaha dapat mendapatkan pencerahan dan bimbingan yang dapat meningkatkan kualitas laporan mereka," imbuhnya.

Selain itu, strategi kedua yang diimplementasikan adalah melalui program open class. DPMP-TSP Sidoarjo membuka kelas pendampingan LKPM yang sa-

sarannya mencakup semua pelaku usaha di Kota Delta. Meskipun ribuan pelaku usaha telah terlibat, masih ada potensi untuk meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan LKPM.

Bambang menekankan bahwa sosialisasi, pendampingan, dan edukasi terkait pelaporan LKPM perlu menjadi fokus pada tahun ini.

Dengan mempertahankan upaya itu, diharapkan Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dan melampaui pencapaian tahun-tahun sebelumnya.

Para legislator di Sidoarjo mendorong peningkatan upaya dari Pemkab untuk menjemput bola agar realisasi investasi di Sidoarjo terus meningkat.

Sesuai norma, perizinan harus memudahkan. Tapi menurut Bambang, memang yang harus ditingkatkan adalah agresivitas pemkab. Agresivitas yang

dimaksud adalah sinergi kuat internal organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Sidoarjo.

Dukungan investasi sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, investor prioritas yang mengungguli pola kemitraan yang baik, melibatkan masyarakat serta memberikan manfaat.

"Yang terpenting, investasi harus benar-benar memberikan manfaat untuk perkembangan warga Sidoarjo," imbuhnya.

Menurut dia, dengan banyaknya pelaku investasi masuk di Sidoarjo, diharapkan dapat menjadi akselerator mendorong perputaran perekonomian.

"Semakin banyak perusahaan yang berdiri pasti membuka lowongan kerja. Saat masyarakat mempunyai pekerjaan, tentu kesejahteraannya juga meningkat," pungkasnya. (nis/vga)



Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo

BEASISWA PENDIDIKAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024

BEASISWA PENDIDIKAN

Beasiswa Bidang

• Helpdesk 081234278662
(Bagian Kesra)

Beasiswa Prestasi Akademik

• Helpdesk 089630324926
081235949497 (Disporapar)

Beasiswa Kurang Mampu

• Helpdesk 085711404090
(Dinas Sosial)

16 APRIL -
15 MEI 2024



Persyaratan Umum

- Warga Kabupaten Sidoarjo
- Mahasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi ASIF (KARITP Kab Sidoarjo)
- Mengisi form dan mengunggah file digitalisasi pada aplikasi <https://beasiswa.sidoarjo.kab.go.id>
- Tidak sedang menerima beasiswa serupa/seperti dari pihak manapun

<https://beasiswa.sidoarjo.kab.go.id>

JANGAN LEWATKAN KESEMPATAN SAMBUT GENERASI EMAS WARGA SIDOARJO

Sidoarjo, Pojok Kiri

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo senang bagi kabar baik! Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan memberikan BEASISWA pendidikan tinggi untuk MAHASISWA SIDOARJO yang berprestasi dalam keagamaan, non akademik, prestasi akademik dan kurang mampu dengan

target 2.000 penerima. Berikut pengumuman dan link pendaftarannya.

"Ayo jangan lewatkan kesempatan emas ini, mari kita berlomba lomba menyambut Indonesia Emas melalui generasi emas Sidoarjo," tutur Pemerintah Pendidikan, Willy pada wartawan, Minggu, 21/4/24. (Khol/Ben)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telp. (031) 821946, 8241145, Fax. 8946024
E-mail: bupati@sidoarjokab.go.id Website: www.sidoarjokab.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon: (031) 821946, 821945, 821953, Faks: (031) 8241145
Email: sekret@sidoarjokab.go.id Website: www.sidoarjokab.go.id

Nomor : 800/4236/438 E. 4/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Pembatasan Pengangkatan
Dalam Jabatan

Sidoarjo, 18 April 2024

Kepada

Yth. Sd. Kepala Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah. Sidoarjo

di -

SIDOARJO

Beritaarkan Keputusan Bupati Sidoarjo nomor 821.2815/438.1.1/2024 tentang Pembatasan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bersama ini disampaikan bahwa terhadap pelantikan pejabat tanggal 22 Maret 2024 dilakukan pembatasan untuk memenuhi ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 2024. Pembatasan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud mulai berlaku sejak tanggal 19 April 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan bahwa sejak berlakunya pembatasan dimaksud, setiap pejabat yang telah dilantik 22 Maret 2024 kembali melaksanakan tugas pada jabatan sebelumnya berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

Dr. FENNY APRIAWATI, S.KM, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804131981032010

Nomor : 800/4236/438 E. 4/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan Pembatasan
Pengangkatan Dalam Jabatan

Sidoarjo, 18 April 2024

Kepada

Sd. Kepala Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah. Sidoarjo

di

SIDOARJO

Sehubungan telah diterapkannya Keputusan Bupati Nomor : 800/4236/438 E. 4/2024 tentang Pembatasan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 18 April 2024, maka bersama ini disampaikan bahwa berlakunya pembatasan pengangkatan dalam jabatan pada tanggal 30 April 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terhadap pejabat yang telah dilakukan pembatasan sebagaimana Keputusan Bupati dimaksud, kembali melaksanakan tugas pada jabatan sebelumnya berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) tertanggal 30 April 2024.

Dengan diterapkannya Surat Sekretaris Daerah ini, maka Surat Sekretaris Daerah Tanggal 18 April 2024, Nomor : 800/4236/438 E. 4/2024, Perihal : Pembatasan Pengangkatan Dalam Jabatan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

Dr. FENNY APRIAWATI, S.KM, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 196804131981032010

PEMERINTAHAN

Semakin Lucu, Kabupaten Lain Gercep Batalikan Mutasi Pejabat, Sidoarjo Malah Siasati Sampai Akhir Bulan

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Liputan Sidoarjo.com



Read Time: 1 Minute, 43 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Puluhan bahkan mungkin ratusan Kabupaten se Indonesia yang kadung melakukan mutasi jabatan pada tanggal 22 Maret 2024 lalu, Gercep melakukan pembatalan mutasi, karena patuh akan Surat Mendagri Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang melaksanakan Pilkada.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telp. (031) 8217941, 8217942, Fax. 8242224
E-mail: dasid@sidokab.go.id Website: www.sidoarkab.go.id

Sidoarjo, 18 April 2024

Nomor : 8004186438. E. 4/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Pembatalan Pengangkatan Dalam Jabatan

Kepada
Yb. Sd. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemkab. Sidoarjo
di -
SIDOARJO

Berikhtakan Keputusan Bupati Sidoarjo nomor 801.2810438.1.1/2024 tentang Pembatalan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bersama ini diumumkan bahwa terhadap penunjukan pejabat tanggal 22 Maret 2024 dilakukan pembatalan untuk memenuhi ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 2024. Pembatalan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud mulai berlaku sejak tanggal 18 April 2024.

Selubungan dengan hal tersebut, bersama ini diumumkan bahwa sejak berlakunya pembatalan dimaksud, setiap pejabat yang telah dilantik 22 Maret 2024 kembali melaksanakan tugas pada jabatan sebelumnya berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) terhitung sejak tanggal 18 April 2024.

Demiikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

D. FENNY APRIDIANATI, S.KM, M. Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 198304131991032010



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telpun. (031) 8217941, 8217942, 8217953 Faks. (031) 8241142
Email: sekda@sidokab.go.id Website: www.sidoarkab.go.id

Sidoarjo, 18 April 2024

Nomor : 8004236438. E. 4/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Pelaksanaan Pembatalan Pengangkatan Dalam Jabatan

Kepada
Yb. Sd. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemkab. Sidoarjo
di
SIDOARJO

Selubungan telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor : 8004236438.E.4/2024 tentang Pembatalan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tanggal 18 April 2024, maka bersama ini diumumkan bahwa berlakunya pembatalan pengangkatan dalam jabatan pada tanggal 30 April 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terhadap pejabat yang telah dilakukan pembatalan sebagaimana Keputusan Bupati dimaksud, kembali melaksanakan tugas pada jabatan sebelumnya berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) terhitung sejak tanggal 30 April 2024.

Dengan ditetapkannya Surat Sekretaris Daerah ini, maka Surat Sekretaris Daerah Tanggal 18 April 2024, Nomor : 8004186438.E.4/2024, Perihal: Pembatalan Pengangkatan Dalam Jabatan dinyatakan tidak berlaku.

Demiikian untuk menjadi perhatian.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

D. FENNY APRIDIANATI, S. KM, M. Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 198304131991032010



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Yang isi dari Surat Kemendagri itu menegaskan, 22 Maret 2024 itu sudah masuk batas waktu tahapan Pilkada, yang dilarang melakukan penggantian pejabat

Namun beda dengan Kabupaten Sidoarjo, bukannya Gercep untuk membatalkan secepatnya mutasi yang ada, namun masih melakukan upaya untuk menunda pembatalan itu dengan siasat siasat yang dianggap legal.

Upaya yang membuat banyak pihak geleng-geleng kepala itu, dengan menurunkan surat pembatalan mutasi berjangka waktu masa berlakunya SK.

Bahkan faktanya, sampai dua kali SK pembatalan mutasi jabatan dikeluarkan oleh Bupati Muhdlor Ali, yang pointnya sama soal pemberlakuan pelaksanaan pembatalan itu.

Liputan Sidoarjo.com

Namun pada Kamis (18/4/2023) kemarin, bupati kembali mengeluarkan SK lagi dengan nomor SK 800/4238/438.6.4/2024, yang isinya juga sama tentang pembatalan pengangkatan dalam jabatan namun untuk tanggal 18 April 2024 dan belaku hingga akhir bulan ini atau tanggal 30 April 2024.

Ada dugaan, diulurnya SK pembatalan itu, menunggu surat izin dari Kemendagri untuk pelantikan ulang pejabat yang terlanjur dilantik.

Namun bila izin Kemendagri RI tak terbit, maka terdapat empat pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan kembali ke posisi awal.

Yakni Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati yang akan kembali menjadi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes).

Lalu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo, Makhmud yang kembali menjadi Kepala BKD.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kemudian, Dwijo Prawito yang menduduki Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo, akan kembali menjadi Kepala BPBD Sidoarjo.

Serta, Budi Basuki akan kembali menempati posisi sebagai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda dari Kepala BKD Sidoarjo.

Selain itu, ada pula 69 pejabat administrator, 158 orang pengawas serta 237 Kepala Sekolah SD negeri dan 27 orang Kepala Sekolah SMP negeri. Mereka nantinya akan kembali ke posisinya semula. (Abidin)

Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Keluarkan Surat Pengantar, BB Pun Kuatkan FA Untuk Terus Jadi Sekda Sampai Akhir Bulan

Admin — 22/04/2024

Share

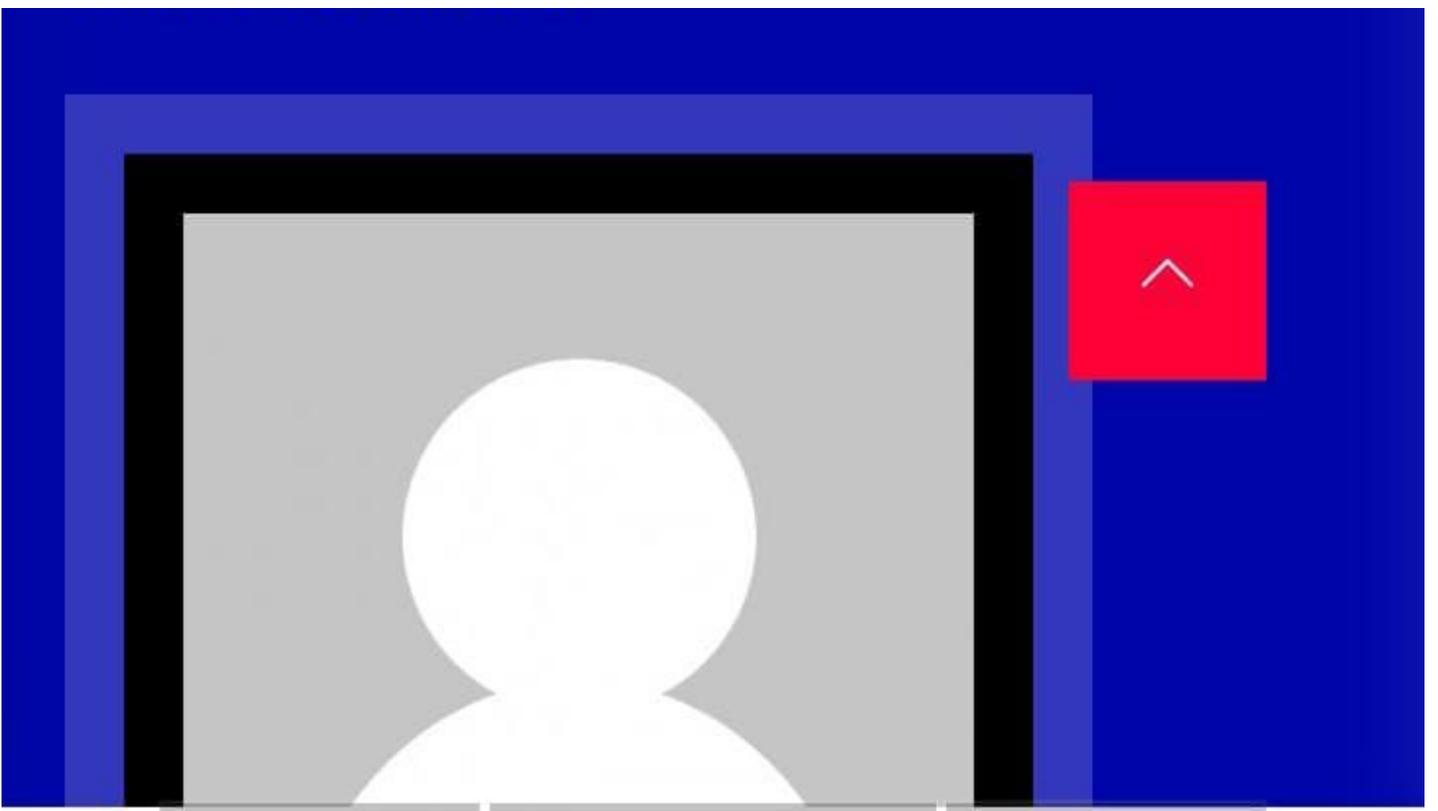
 **Read Time:** 1 Minute, 8 Second



SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-

Nampaknya antara Fenny Apridawati dan Budi Basuki dua pejabat yang dibatalkan jabatannya karena disinyalir menabrak aturan mendagri, sama-sama kompak untuk menguatkan posisinya sampai akhir bulan April ini.





Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Kemudian, Dwijo Prawito yang menduduki Kepala Dinas Perikanan Sidoarjo, akan kembali menjadi Kepala BPBD Sidoarjo.

Serta, Budi Basuki akan kembali menempati posisi sebagai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda dari Kepala BKD Sidoarjo.

Selain itu, ada pula 69 pejabat administrator, 158 orang pengawas serta 237 Kepala Sekolah SD negeri dan 27 orang Kepala Sekolah SMP negeri. Mereka nantinya akan kembali ke posisinya semula. (Abidin)

Liputan Sidoarjo.com



POLITIK

Cak Imin : Hari ini PKB Resmi Buka Pendaftaran Pilkada 2024

Admin — 20/04/2024

Share

[Liputan Sidoarjo.com](http://LiputanSidoarjo.com)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

 **Read Time:** 1 Minute, 33 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Partai PKB secara resmi mengumumkan membuka pendaftaran secara terbuka bagi siapa pun yang ingin maju dalam Pilkada 2024.



Cak Imin (Muhaimin Iskandar)

Liputan Sidoarjo.com

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, sejauh ini belum ada kader internal partai yang bisa dipercaya untuk maju dalam Pilkada.

“Sampai detik ini saya belum tahu kader internal dan saya cenderung nggak percaya kader internal hahaha,” ucap Cak Imin dalam konferensi pers di rumah dinas nya, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (20/4/2024) seperti diberitakan dtk.

Namun, Cak Imin tidak menjelaskan secara rinci makna ungkapannya yang menyebut tidak percaya terhadap kader internal.

Seperti diketahui, Cak Imin mengumumkan pembukaan pendaftaran secara terbuka bagi masyarakat yang berniat maju dalam kontestasi Pilkada 2024.

Dia mengatakan tidak membatasi siapa pun pihak yang ingin mencalonkan diri lewat PKB.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Sejak hari ini tanggal 20 April 2024, saya nyatakan PKB membuka pendaftaran, PKB membuka peluang kepada semua pihak, latar belakang perbedaan partai, latar belakang perbedaan agama, suku, golongan, boleh mendaftar yang ingin diusung oleh PKB,” kata Cak Imin.

Cak Imin menjelaskan pihak internal partai nantinya akan menetapkan beberapa kriteria terhadap para calon termasuk rekam jejak.

Dia juga menyebut PKB memiliki peluang dalam menentukan setiap calon di Pilkada baik secara mandiri maupun berkoalisi.

“Tentu kami akan menentukan berdasarkan beberapa kriteria dan indikator termasuk visi dan misinya sekaligus komitmen dan track recordnya serta kapasitas dan kemampuannya terutama,” jelas Cak Imin.

Liputan Sidoarjo.com

Namun dia meyakini banyak dari pengurus yang telah melakukan komunikasi ke berbagai tokoh.

“Sampai detik ini belum ada satu tokoh pun yang khususnya saya sebagai ketua umum mengincar atau kita pilih gitu belum. Saya nggak tahu kalau tim-tim yang sudah berkomunikasi di belakang. hahaha. Sudah banyak yang melamar ya? Sudah banyak yang melakukan pendekatan tapi belum tau saya ke siapa dan siapa belum tahu,” katanya.(Abidin)

Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



POLITIK

PKB Sidoarjo Masih Persiapan, PDIP Siap Buka Pendaftaran Dalam Pekan Ini

[Liputan Sidoarjo.com](http://LiputanSidoarjo.com)

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- H.Abdillah Nasih Sekretaris DPC PKB Sidoarjo yang juga ketua desk Pilkada PKB, mengaku pihaknya masih melakukan penggodokan untuk menerima pendaftaran Calon kepala daerah melalui PKB.



Abdillah Nasih



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dihubungi melalui pesan elektronik, Nasih menjawab singkat untuk penjaringan Pilkada di Sidoarjo.

“Ya, kita masih menggodoknya,” ujar Nasih Minggu (21/4)2024) pagi.

Proses penggodokan desk Pilkada PKB ini, merupakan aplikasi dari pengumuman resmi DPP PKB yang membuka pendaftaran secara terbuka bagi siapa pun yang ingin maju dalam Pilkada 2024.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, tidak membatasi siapa pun pihak yang ingin mencalonkan diri lewat PKB.

“Sejak hari ini tanggal 20 April 2024, saya nyatakan PKB membuka pendaftaran, PKB membuka peluang kepada semua pihak, latar belakang perbedaan partai, latar belakang perbedaan agama, suku, golongan, boleh mendaftar yang ingin diusung oleh PKB,” kata Cak Imin.

Liputan Sidoarjo.com

Cak Imin menjelaskan pihak internal partai nantinya akan menetapkan beberapa kriteria terhadap para calon termasuk rekam jejak.

Dia juga menyebut PKB memiliki peluang dalam menentukan setiap calon di Pilkada baik secara mandiri maupun berkoalisi.

“Tentu kami akan menentukan berdasarkan beberapa kriteria dan indikator termasuk visi dan misinya sekaligus komitmen dan track recordnya serta kapasitas dan kemampuannya terutama,” jelas Cak Imin.

Khusus di internal DPC PKB Sidoarjo, sudah ada dua nama yang terang terangan siap maju menjadi calon bupati Sidoarjo pada Pemilu 2024 ini.

Yang pertama H.Usman M.Kes ketua DPRD Sidoarjo, yang mengawali kesiapannya maju sebagai calon bupati dengan tagline Sidoarjo berkelanjutannya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Selanjutnya disusul H.Subandi SH, ketua DPC
PKB Sidoarjo, yang juga menyatakan siap
menjadi orang nomor satu di kota delta ini.



Samsul Hadi

[Liputan Sidoarjo.com](http://LiputanSidoarjo.com)

Sementara itu, DPC PDIP Sidoarjo juga dalam waktu dekat ini, siap membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah.

Samsul Hadi SE.MM sekretaris DPC PDIP memberi isyarat dalam pekan ini.

“InsyaAllah secepatnya dalam pekan, kemungkinan Senin,” terangnya. (Abidin)

Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

2. 03, miliar.

Dengan nilai yang besar dan setiap tahun menjadi temuan BPK ini, tentu saja komisi B DPRD turut gerah.



H. Bambang Pujiyanto ketua komisi B

Liputan Sidoarjo.com

H. Bambang Pujiyanto ketua komisi B DPRD Sidoarjo, bahkan berencana mengundang dinas koperasi dan beberapa dinas terkait seperti Disperindag dan Dinas pangan, untuk meminta penjelasan ini.

“Macetnya dana bergulir ini tentu saja menjadi perhatian kami. Apalagi ini uang negara yang harus jelas peruntukannya kepada siapa saja. Kita akan jadwalkan mengundang dinas terkait dalam pekan ini,” tutur Bambang.

Seperti diketahui pada surat BPK tertanggal 21 Maret 2024 yang ditanda tangani Ratih Kartika Dewi selaku ketua pemeriksa, disebutkan OPD yang diminta untuk segera menyerahkan data diantaranya Dinas Ketahanan Pertanian dan Pangan, Disperindag, Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas PMD.

Menurut sumber terpercaya, temuan BPK atas dana bergulir ini, disebabkan banyak pelaku usaha penerima waktu itu tidak terverifikasi dengan benar.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Akibatnya, milyaran dana yang mestinya harus kembali ke pemerintah, macet dan belum ada upaya untuk menghapusnya.

“Sehingga tiap tahun pasti ada surat permintaan data ini dari BPK, karena dana bergulir itu juga menggunakan uang negara,” ungkap sumber ini.

Tidak hanya itu, pemberian dana bergulir pada tahun 2012 lalu itu, saat Disperindag dan Dinas Koperasi masih menjadi satu OPD

Pasca Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meluncurkan surat permintaan kelengkapan data penerima kepada beberapa OPD terkait di Pemkab Sidoarjo.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi M. Edi Kurniadi ST.MM. mengaku akan mempelajari surat BPK itu untuk langkah lanjutan.

Liputan Sidoarjo.com

Ditemui di acara halal bi halal bersama Bupati Sidoarjo, Edi mengaku sudah menerima surat dari BPK itu.

Soal data penerima yang dimaksud, pihaknya akan melakukan ricek data terlebih dahulu.

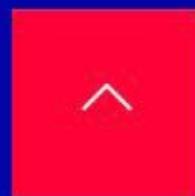
“Tentu kita siapkan data yang dimaksud oleh BPK. Karena datanya memang sudah agak lama perlu kita bongkar lagi,” jelas Edi.

Untuk kemungkinan pemutihan penerima dana bergulir itu, Edi menyatakan belum melakukan pembahasan lebih lanjut.

Namun jika memungkinkan, langkah pemutihan itu bisa jadi dilakukan.

Sementara itu Fenny Apridawati Sekda Sidoarjo yang pernah menjabat sebagai Kadinkoperindag pada tahun 2013 silam, melempar persoalan ini ke Dinas koperasi saat ini.

“Silahkan tanya data ke Dinas koperasi,” tuturnya. (Abidin)



Jawa Pos



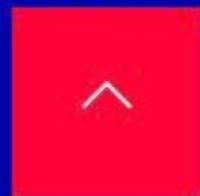
INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PENEGAKAN HUKUM RAGAM PERISTIWA

Kasus Macet Dana Bergulir, JCW Minta BPK Evaluasi Predikat WTP Sidoarjo Dan Dorong Lapor APH





Read Time: 1 Minute, 46 Second

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Temuan BPK soal macetnya dana bergulir milyaran rupiah di Dinas Koperasi dan beberapa dinas lain, membuat predikat Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemkab Sidoarjo hingga 10 kali dipertanyakan.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sigit Imam Basuki, ST Ketua Umum JCW (Java Corruption Watch) menyebutkan, dengan temuan BPK soal macetnya Dana Bergulir tahunan itu, mestinya predikat WTP untuk Sidoarjo dievaluasi.

“Bagaimana bisa ada dana macet milyaran rupiah dan sudah tiap tahun menjadi temuan, kok tetap dapat WTP dari BPK?, ini harus dievaluasi,” terangnya.

Tidak hanya cukup dievaluasi imbuah Sigit, ketika sudah tiap tahun disurati BPK dan pihak OPD tidak merespon, maka BPK bisa segera melakukan upaya hukum ke pihak berwajib.

Liputan Sidoarjo.com

“Karena ini menyangkut kerugian keuangan Negara, tidak mungkin Dinas itu sampai kehilangan atau sudah tidak punya data lagi, pasti masih tersimpan diarsipkan, artinya Dinas ini dikategorikan melanggar UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ungkap Sigit lagi.

Menurut Sigit, bahwa persoalan hukum terkait korupsi tidak ada batas waktunya.

“Korupsi itu belum selesai jika belum ada proses penyelesaian di pengadilan,” ucap Sigit Imam Basuki.

Dari data yang ada nilai dana yang macet ternyata lumayan besar mencari angka Rp 10 miliar lebih.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bahkan selain dana bergulir, ada juga dana macet sehingga masuk dalam piutang di Dinas Koperasi yang disebut Channeling senilai Rp 3 miliar.

Chanelling sendiri adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan non perbankan dimana pemerintah menanggung risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.

Dari data yang ada, Dagulir yang masuk data piutang di Dinas koperasi sebesar 8,4 miliar ditahun tahun 2022, dan sedikit turun ditahun 2023 sebesar Rp 8,2 miliar.

Tidak hanya di dinas koperasi, pada Dinas Pangan Dana bergulir yang masuk piutang sebesar Rp 2,5 miliar pada tahun 2022, dan sedikit turun di tahun 2023 sebesar Rp 2.03, miliar.

Dengan nilai yang besar dan setiap tahun menjadi temuan BPK ini, tentu saja komisi B DPRD turut gerah.

“Kita akan undang OPS terkait untuk masalah ini,” ujar Bambang Pujiyanto ketua komisi B.
(Abidin)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DNN TV



☆ Berita Utama

▶ BERITA TV

🕒 Terkini

Home > Berita

Pagi Ini Fenny Gelar Rakor Pengisian Jabatan, Siang Nanti Komisi A DPRD Janji Bongkar Masalah Kepegawaian Daerah

Admin

Monday, April 22, 2024, April 22, 2024 WIB





Fenny Apridawati dan surat undangannya pada seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Sidoarjo. (foto Fenny by: sidoarjonews.id)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DNN, SIDOARJO – Senin (22/04/2024)

mulai pukul 07.30 pagi ini, Sekda

Sidoarjo, Fenny Apridawati

mengundang seluruh Kepala Perangkat

Daerah (KPD). Mereka akan bertemu di

Ruang Delta Wicaksana untuk

menggelar Rapat Koordinasi Pengisian

Jabatan.

Dalam undangan yang dikeluarkan

Minggu, 21 April 2024 Fenny

mengundang 65 orang yang tidak boleh

diwakilkan. Mereka diantaranya Asisten

Sekda, para Staf Ahli, Kepala Bagian di

lingkungan Sekretariat Daerah,



**semua Kepala Dinas dan Badan,
Direktur RSUD Sidoarjo dan RSUD
Sidoarjo Barat serta para Camat.**

**Sementara itu informasi dari DPRD
Sidoarjo menyebutkan adanya agenda
hearing atau Rapat Dengar Pendapat
yang digelar Komisi A untuk membahas
masalah kepegawaian di lingkungan
Pemkab Sidoarjo. Khususnya terkait
pembatalan pelantikan pejabat daerah
yang dilakukan 22 Maret lalu.**





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

**semua Kepala Dinas dan Badan,
Direktur RSUD Sidoarjo dan RSUD
Sidoarjo Barat serta para Camat.**

**Sementara itu informasi dari DPRD
Sidoarjo menyebutkan adanya agenda
hearing atau Rapat Dengar Pendapat
yang digelar Komisi A untuk membahas
masalah kepegawaian di lingkungan
Pemkab Sidoarjo. Khususnya terkait
pembatalan pelantikan pejabat daerah
yang dilakukan 22 Maret lalu.**



Melalui chat di berbagai WA Grup, Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori berjanji akan membongkar habis masalah yang kini tengah menjadi polemik di masyarakat tersebut di forum itu. “Lihat saja kejutannya,” tandas legislator PKB itu.

Polemik ini sendiri bermula dari penerbitan surat tentang pelaksanaan pembatalan pelantikan 500 orang pejabat yang dibuat Fenny pada 16 dan 18 April 2024 lalu. Padahal jabatannya sebagai Sekda sudah dianulir Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor melalui SK yang ditandatangani pada 5 April 2024.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Atas dasar itu Komisi A menganggap tak selayaknya surat yang menginstruksikan 'balik kucing'-nya ratusan pejabat daerah tersebut ke posisi lamanya itu tidak ditandatangani oleh Fenny yang tetap menempatkan dirinya sebagai Sekda.

Pembatalan pelantikan itu sendiri dilakukan karena melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) yang melarang adanya pergantian pejabat, enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dalam Pilkada serentak 2024 tanpa adanya persetujuan tertulis dari Mendagri.(pram/sein)

